

Katalog: 7102025.51

# INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

## PROVINSI BALI

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

# INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI BALI

2017



# **INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI BALI 2017**

ISBN : 978-602-1393-54-3

No Publikasi : 51540.1807

Katalog : 7102025.51

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm.

Jumlah Halaman : x + 42 halaman.

Naskah : Bidang Statistik Distribusi.

Penyunting : Bidang Statistik Distribusi.

Kover : Bidang Statistik Distribusi.

Ilustrasi Kover : Designed by vector\_corp / Freepik.

Designed by evening\_tao / Freepik.

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Bali.

Dicetak Oleh : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

**Tim Penyusun**

**Indeks Kemahalan Konstruksi**

**Provinsi Bali 2017**

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Adi Nugroho, M.M.

Penanggung Jawab Teknis:

I Gede Nyoman Subadri, SE.

Koordinator:

Ni Made Inna Dariwardani, MA., ME.

Anggota:

Putu Simpen Arini, SST, M.Si.

Layout:

Robi Nasehat Tono Amboro, ST.



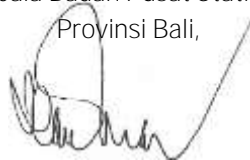
# KATA PENGANTAR

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan harga barang atau jasa konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/ Kota di Bali.

Data IKK merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan data IKK di Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Provinsi Bali Tahun 2013-2017.

Semoga publikasi ini bermanfaat dan memenuhi harapan pengguna data. Berbagai saran dan masukan sangat kami harapkan demi edisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, terutama kepada perusahaan dan responden atas kerjasamanya dalam memberikan data dasar yang diperlukan.

Denpasar, Oktober 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Bali,



Ir. Adi Nugroho, M.M.



## Daftar isi

---

Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Lampiran .....	x
Bab I:	
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Cakupan.....	3
1.4 Konsep dan Definisi.....	3
Bab II:	
Metodologi.....	5
2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi.....	5
2.2 Paket Komoditas IKK .....	7
2.3 Diagram Timbang IKK .....	11
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU) .....	14
Bab III:	
Ulasan Ringkas .....	17
3.1 Gambaran Umum Provinsi Bali.....	17
3.2 Dana Alokasi Umum Provinsi Bali.....	22
3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali.....	23
3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota.....	26
Lampiran .....	31



## Daftar Tabel

---

Tabel 3.1. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Status di Bali, 2017 .....	21
Tabel 3.2. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan Keadaan Akhir di Bali Tahun 2017 (km).....	22
Tabel 3.3. Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2017.....	23
Tabel 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	27

## Daftar Gambar

---

Gambar 3.1. Persentase Luas Wilayah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2017.....	18
Gambar 3.2. Ketinggian Ibu Kota Kabupaten di Provinsi Bali, 2017.....	20
Gambar 3.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2017.....	24
Gambar 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota, 2017.....	25
Gambar 5. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2017. ....	28

## Lampiran

---

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2013 (Kota Samarinda = 100). .....	33
Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2014 (Kota Samarinda = 100). .....	34
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2015 (Kota Surabaya = 100). .....	35
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2016 (Kota Surabaya = 100). .....	36
Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017 (Kota Surabaya = 100). .....	37
Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2013 Provinsi Bali (Kota Samarinda = 100). .....	38
Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2014 Provinsi Bali (Kota Samarinda = 100). .....	39
Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2015 Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100). .....	40
Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2016 Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100). .....	41
Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2017 Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100). .....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan Otda menggunakan sistem desentralisasi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, Otda diharapkan mampu mengatasi masalah ketimpangan keuangan antarwilayah di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Pembangunan terdesentralisasi yang diterapkan membutuhkan suatu indikator untuk perimbangan keuangan daerah otonom. Untuk mendukung hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu dana perimbangan tersebut yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 tentang alokasi DAU, DAU merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah, sekaligus memeratakan kemampuan antardaerah (*equalization grant*). Dalam penyusunan besaran DAU untuk masing-masing daerah, beberapa komponen data yang diperlukan yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

IKK didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan suatu kota acuan. Untuk menghitung IKK, diperlukan beberapa data yaitu: harga bahan bangunan atau konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot atau diagram timbang. IKK pertama kali dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

## 1.2 Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali 2017 dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dan perbandingan dengan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Bali dengan provinsi lainnya.

## 1.3 Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017.

## 1.4 Konsep dan Definisi

### 1.4.1 Bahan bangunan atau konstruksi

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

## 1.4.2 Kegiatan Konstruksi

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang tercatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

## 1.4.3 Sewa Alat Berat

Harga sewa alat berat konstruksi didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini yaitu 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas umur maksimal yaitu 8 tahun.

# BAB II

## METODOLOGI

### 2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang relatif beragam dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, infrastruktur diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi di Indonesia. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut. Untuk melihat perbedaan tingkat harga konstruksi antar wilayah, disusun suatu indeks sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografisnya yang dikenal dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

IKK merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan atau jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.



Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Disisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. **Penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga input.**

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya. Penentuan kota acuan dalam penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK

mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013 sampai 2014 digunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan, sedangkan pada tahun 2015 hingga 2017 digunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan.

## 2.2 Paket Komoditas IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam International Comparison Programs (ICP) tahun 2005. Dalam metode BOCC, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah

yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Mengacu pada pendekatan BOCC, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2017, jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 57 jenis yang terdiri dari 44 jenis bahan bangunan, 8 jenis sewa alat berat; serta 5 jenis upah tukang bangunan.

IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan yaitu bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; prasarana untuk pertanian; jalan, jembatan dan pelabuhan; bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya. Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut.

a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
  2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung Perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.
- b. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:
1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), bendung (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
  2. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
- c. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan ,jembatan, dan pelabuhan:
1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu rambu lalu lintas.
  2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.

3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi:
1. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
  2. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
  3. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
  4. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
  5. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.

6. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
7. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
8. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
9. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
10. Bangunan lainnya, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

### 2.3 Diagram Timbang IKK

Diagram timbangan yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2017 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2017 menggunakan penimbang *updating* BoQ sampai tahun 2016. pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Macam-macam jenis penimbang tersebut yaitu:

- W1 merupakan penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, jaringan, serta bangunan lainnya.
- W2 merupakan penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
- W3 merupakan penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini merupakan BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2012, 2013, 2014, dan 2016 di kabupaten/kota yang bersangkutan. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Pengolahan data IKK tahun 2017 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 (empat) periode

pencacahan yaitu Juli 2016, Oktober 2016, Januari 2017, dan April 2017. Seperti halnya IKK tahun 2016, IKK tahun 2017 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Penghitungan IKK 2017 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- Tahap pertama yaitu penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota.
- Tahap penghitungan kedua yaitu menghitung PPP (*Purchasing Power Parity*) sistem dengan menggunakan metode regresi CPD (*Country Product Dummy*).
- Tahap penghitungan ketiga yaitu menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem).
- Tahap penghitungan keempat yaitu menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik.
- Tahap penghitungan terakhir yaitu menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang dengan bobot realisasi



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) komponen pembentukan modal tetap.

## 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang

tertuang dalam Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Rumusan Formula DAU sebagai berikut :

**DAU : Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)**

AD : Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan.

CF : Kebutuhan Fiskal (KbF) - Kapasitas Fiskal (KpF).

KbF : Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + (% Luas Wilayah) + (% Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)) + (% Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita).

KpF : (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil).

Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).



# BAB III

## ULASAN RINGKAS

### 3.1 Gambaran Umum Provinsi Bali

#### 3.1.1 Kondisi Geografis

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan ibukota provinsinya yaitu Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau Bali. Pulau Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa.

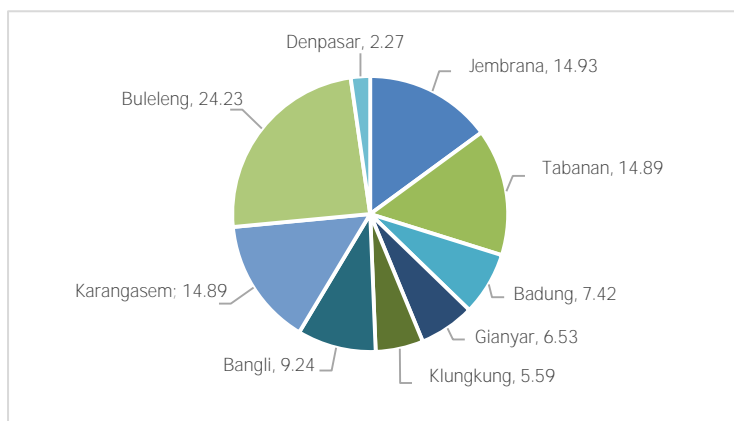
Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia.
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan tercatat sebesar 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Diantara ke sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng tercatat memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km<sup>2</sup> (14,93%), Karangasem 839,54 km<sup>2</sup> (14,89%), dan Tabanan 839,33 km<sup>2</sup> (14,89%). Sisanya berturut-turut yaitu Bangli 520,81 km<sup>2</sup>, Badung 418,52 km<sup>2</sup>, Gianyar 368,00 km<sup>2</sup>, Klungkung 315,00 km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup>.

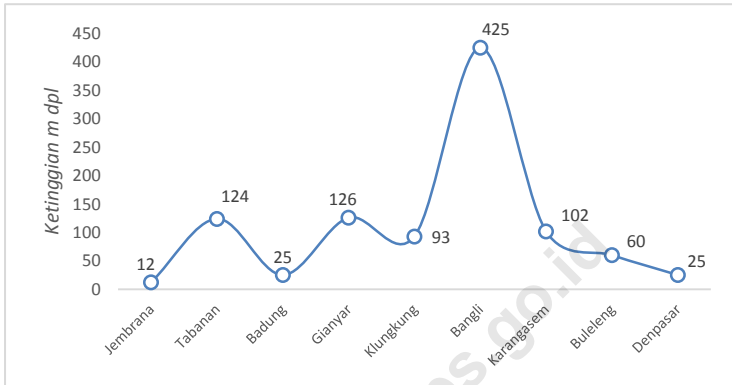
Gambar 3.1. Persentase Luas Wilayah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2017



Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yakni Gunung Agung yang merupakan titik tertinggi di Bali tercatat setinggi 3.142 meter. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) tercatat seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Ibukota Kabupaten Bangli merupakan ibu kota yang memiliki ketinggian paling tinggi yaitu tercatat sebesar 425 meter dari permukaan laut. Sedangkan ibukota Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan ketinggian paling rendah yaitu 12 meter dari permukaan laut.

Gambar 3.2. Ketinggian Ibu Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2017



### 3.1.1 Kondisi Transportasi

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (*supply*), kelancaran distribusi barang/jasa (kontruksi) ke suatu wilayah diduga berpengaruh besar. Dengan demikian kondisi jalan menjadi syarat dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi. Data pada tahun 2017 menunjukkan panjang jalan nasional di Bali tercatat sepanjang 629,39 km dan jalan provinsi **743,34 km**.

Tabel 3.1. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Status di Bali, 2017

Kabupaten/Kota	Jalan Nasional (km)	Jalan Provinsi (km)	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jembrana	72.63	29.48	102.11	7.44
2. Tabanan	65.73	136.72	202.45	14.75
3. Badung	63.62	61.18	124.80	9.09
4. Gianyar	64.33	85.52	149.85	10.92
5. Klungkung	37.71	9.34	47.05	3.43
6. Bangli	21.19	125.14	146.33	10.66
7. Karangasem	97.97	145.98	243.95	17.77
8. Buleleng	156.34	106.65	262.99	19.16
9. Denpasar	49.88	43.33	93.21	6.79
10. Total	629.39	743.34	1 372.72	100

Dilihat dari kondisi permukaannya, jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 764,68 km (55,70%), yang tergolong kondisi sedang tercatat sepanjang 469,09 km (34,17%), dan kondisi rusak tercatat sepanjang 136,07 km (9,91).



Tabel 3.2. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan Keadaan Akhir di Bali Tahun 2017 (km)

Status Jalan	Kondisi				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jalan Nasional	362.72	249.78	14.00	2.90	629.4
2. Jalan Provinsi	401.96	219.31	122.07	0	743.34
Total	764.68	469.09	136.07	2.90	1 372.74

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak barang masuk dari luar provinsi Bali menuju setiap kabupaten/kota di Bali. Akses barang masuk dari luar Provinsi Bali melalui empat pelabuhan yaitu Benoa, Padangbai, Celukan Bawang, dan Gilimanuk. Dari keempat pelabuhan tersebut, bongkar dan muat barang paling banyak terjadi di pelabuhan Gilimanuk.

### 3.2 Dana Alokasi Umum Provinsi Bali

Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Suatu daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Besaran DAU per

Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2017 kami sajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.3. Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Ribuan Rupian)
(1)	(2)
1. Kabupaten Jembrana	562 525 134
2. Kabupaten Tabanan	826 283 780
3. Kabupaten Badung	336 243 365
4. Kabupaten Gianyar	705 975 450
5. Kabupaten Klungkung	539 855 201
6. Kabupaten Bangli	568 278 934
7. Kabupaten Karangasem	732 963 859
8. Kabupaten Buleleng	982 698 080
9. Kota Denpasar	661 794 756
Provinsi Bali	1 234 481 776

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling besar di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng dengan DAU sebesar 982,7 miliar rupiah yang disusul oleh Kabupaten Tabanan sebesar 826,3 miliar rupiah. Sedangkan kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling rendah adalah Kabupaten Badung dengan DAU sebesar 336,2 miliar rupiah.

### 3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Semakin

besar IKK menunjukkan relatif semakin tinggi harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

Gambar 3.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2017

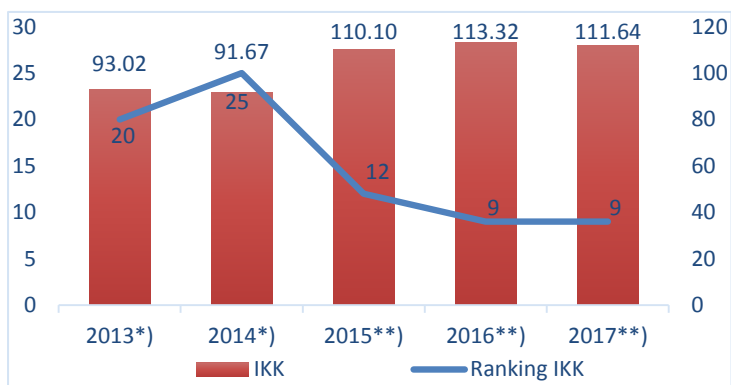


Pada tahun 2017, nilai IKK Provinsi Bali tercatat sebesar 111,64. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Bali 11,64 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kota acuan (Kota Surabaya). Jika dilihat dari besaran IKK-nya, rata-rata IKK di Provinsi Bali relatif lebih tinggi dibanding nilai IKK provinsi-provinsi yang berada di Pulau

Jawa. Hal ini wajar karena sebagian barang konstruksi didatangkan dari pulau Jawa. Sebagian barang lainnya seperti batu bata, batako, dan barang-barang natura (pasir, kerikil, dan lainnya) dihasilkan di Provinsi Bali. Namun dikarenakan adanya penutupan sejumlah usaha galian C di Kabupaten Karangasem (Perda Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012), jumlah produksi barang-barang natura itu pun semakin sedikit.

Pada tahun 2017, IKK tertinggi tercatat di Provinsi Papua sebesar 229,82 sedangkan IKK terendah tercatat di Jambi sebesar 88,39. Jika dilihat menurut kawasannya, IKK Provinsi Bali menempati urutan ke-2 setelah DKI Jakarta (117,57) dibandingkan 9 provinsi yang ada di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra).

Gambar 3.4. Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali, 2013-2017



\*) Kota Acuan Samarinda

\*\*) Kota Acuan Surabaya

Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi, pada tahun 2017 Provinsi Bali menduduki urutan ke-9 dari 34 Provinsi di Indonesia. Semakin kecil ranking IKK maka semakin besar nilai IKK suatu wilayah. Ranking IKK tahun 2017 sama seperti ranking tahun 2016 namun lebih tinggi dibanding tahun 2015. Hal ini menandakan semakin mahal harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Bali dibanding wilayah lainnya. Pada rentang tahun 2016-2017, kenaikan harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Bali relatif lebih cepat terhadap kota acuan (Kota Surabaya) dibandingkan kenaikan harga barang/jasa di wilayah lain terhadap kota acuan (Kota Surabaya).

Karena merupakan indeks spasial, kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan/penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan (Kota Surabaya).

### 3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota

IKK dikumpulkan di 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki nilai IKK paling tinggi yaitu Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 469,96

kemudian disusul Kabupaten Puncak Jaya sebesar 436,94 serta Kabupaten Intan Jaya sebesar 412,52. Ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Papua. Nilai IKK terendah tercatat di Kabupaten Donggala (Provinsi Sulawesi Tengah) sebesar 76,50 kemudian disusul Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi) sebesar 76,81; serta Kabupaten Lampung Timur sebesar 80,49.

Tabel 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)
1. Kabupaten Jembrana	112,93
2. Kabupaten Tabanan	116,36
3. Kabupaten Badung	114,54
4. Kabupaten Gianyar	112,40
5. Kabupaten Klungkung	101,40
6. Kabupaten Bangli	111,63
7. Kabupaten Karangasem	106,66
8. Kabupaten Buleleng	118,47
9. Kota Denpasar	111,37
Provinsi Bali	111,64

Dari 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, IKK tertinggi pada tahun 2017 tercatat di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 118,47 kemudian disusul Kabupaten Tabanan sebesar 116,36 dan Kabupaten Badung sebesar 114,54. Sementara itu, IKK terendah tercatat di Kabupaten Klungkung sebesar 101,40. Nilai IKK Kabupaten Buleleng sebesar 118,47 menunjukkan

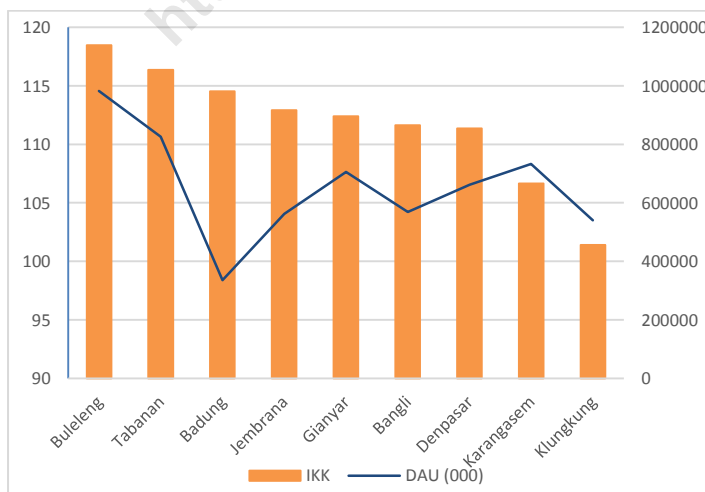
tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kabupaten Buleleng 18,47 persen lebih besar daripada kota acuan (Kota Surabaya). Dengan kata lain, jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Surabaya dibutuhkan biaya 100 milyar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Buleleng akan memerlukan biaya sebesar 118,47 milyar rupiah. Kondisi topografi yang relatif berbukit serta jarak yang cukup jauh dengan pusat bongkar muat barang konstruksi diduga memberi sumbangan terhadap tingginya harga barang/jasa konstruksi di Kabupaten Buleleng.

Gambar 3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota, 2017



IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Perolehan DAU masing-masing kabupaten/kota di Bali sejalan dengan nilai IKKnya. Alokasi DAU paling besar tercatat di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 982,698 Milyar rupiah. Hal ini sejalan dengan besaran nilai IKK Kabupaten Buleleng yang paling tinggi se-Provinsi Bali. Kabupaten Badung dengan nilai IKK sebesar 114,54 atau peringkat ke-3 dari 9 kabupaten/kota di Bali tercatat memperoleh DAU paling kecil yaitu 336,243 milyar rupiah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang cukup besar sehingga memiliki kemandirian fiskal dan tidak bergantung pada DAU.

Gambar 3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2017







# LAMPIRAN

<https://bpti.bps.go.id>



Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2013  
(Kota Samarinda = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	91,61
2	1200	Sumatera Utara	95,92
3	1300	Sumatera Barat	88,72
4	1400	Riau	101,28
5	1500	Jambi	96,67
6	1600	Sumatera Selatan	95,29
7	1700	Bengkulu	94,98
8	1800	Lampung	89,79
9	1900	Bangka Belitung	99,59
10	2100	Kepulauan Riau	109,42
11	3100	DKI Jakarta	100,00
12	3200	Jawa Barat	89,10
13	3300	Jawa Tengah	85,38
14	3400	DI Yogyakarta	86,52
15	3500	Jawa Timur	85,94
16	3600	Banten	89,25
17	5100	Bali	93,02
18	5200	Nusa Tenggara Barat	80,01
19	5300	Nusa Tenggara Timur	87,67
20	6100	Kalimantan Barat	107,38
21	6200	Kalimantan Tengah	100,29
22	6300	Kalimantan Selatan	97,88
23	6400	Kalimantan Timur	100,00
24	6500	Kalimantan Utara	-
25	7100	Sulawesi Utara	103,00
26	7200	Sulawesi Tengah	86,60
27	7300	Sulawesi Selatan	85,89
28	7400	Sulawesi Tenggara	96,42
29	7500	Gorontalo	93,18
30	7600	Sulawesi Barat	91,96
31	8100	Maluku	101,02
32	8200	Maluku Utara	115,12
33	9100	Papua Barat	121,01
34	9400	Papua	188,70

Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2014  
(Kota Samarinda = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	93,54
2	1200	Sumatera Utara	96,08
3	1300	Sumatera Barat	92,90
4	1400	Riau	102,89
5	1500	Jambi	94,90
6	1600	Sumatera Selatan	96,80
7	1700	Bengkulu	96,21
8	1800	Lampung	91,87
9	1900	Bangka Belitung	102,09
10	2100	Kepulauan Riau	107,34
11	3100	DKI Jakarta	97,13
12	3200	Jawa Barat	88,05
13	3300	Jawa Tengah	83,00
14	3400	DI Yogyakarta	84,81
15	3500	Jawa Timur	87,62
16	3600	Banten	89,19
17	5100	Bali	91,67
18	5200	Nusa Tenggara Barat	81,00
19	5300	Nusa Tenggara Timur	89,31
20	6100	Kalimantan Barat	109,46
21	6200	Kalimantan Tengah	103,23
22	6300	Kalimantan Selatan	99,18
23	6400	Kalimantan Timur	100,00
24	6500	Kalimantan Utara	109,86
25	7100	Sulawesi Utara	102,10
26	7200	Sulawesi Tengah	86,62
27	7300	Sulawesi Selatan	88,55
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,67
29	7500	Gorontalo	93,62
30	7600	Sulawesi Barat	94,79
31	8100	Maluku	104,43
32	8200	Maluku Utara	117,89
33	9100	Papua Barat	125,79
34	9400	Papua	191,86

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2015  
(Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	97,74
2	1200	Sumatera Utara	102,54
3	1300	Sumatera Barat	103,01
4	1400	Riau	104,97
5	1500	Jambi	96,64
6	1600	Sumatera Selatan	105,12
7	1700	Bengkulu	101,64
8	1800	Lampung	97,57
9	1900	Bangka Belitung	104,90
10	2100	Kepulauan Riau	122,33
11	3100	DKI Jakarta	110,13
12	3200	Jawa Barat	101,09
13	3300	Jawa Tengah	95,99
14	3400	DI Yogyakarta	99,06
15	3500	Jawa Timur	100,00
16	3600	Banten	101,82
17	5100	Bali	110,10
18	5200	Nusa Tenggara Barat	91,80
19	5300	Nusa Tenggara Timur	97,59
20	6100	Kalimantan Barat	118,87
21	6200	Kalimantan Tengah	110,99
22	6300	Kalimantan Selatan	102,92
23	6400	Kalimantan Timur	119,06
24	6500	Kalimantan Utara	129,56
25	7100	Sulawesi Utara	110,61
26	7200	Sulawesi Tengah	92,49
27	7300	Sulawesi Selatan	96,38
28	7400	Sulawesi Tenggara	105,85
29	7500	Gorontalo	103,05
30	7600	Sulawesi Barat	98,46
31	8100	Maluku	119,45
32	8200	Maluku Utara	125,78
33	9100	Papua Barat	146,01
34	9400	Papua	247,91

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2016  
(Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,14
2	1200	Sumatera Utara	102,76
3	1300	Sumatera Barat	103,69
4	1400	Riau	103,49
5	1500	Jambi	97,99
6	1600	Sumatera Selatan	106,15
7	1700	Bengkulu	101,86
8	1800	Lampung	99,40
9	1900	Bangka Belitung	107,64
10	2100	Kepulauan Riau	125,89
11	3100	DKI Jakarta	112,48
12	3200	Jawa Barat	103,79
13	3300	Jawa Tengah	98,96
14	3400	DI Yogyakarta	100,65
15	3500	Jawa Timur	101,78
16	3600	Banten	103,66
17	5100	Bali	113,32
18	5200	Nusa Tenggara Barat	93,70
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,82
20	6100	Kalimantan Barat	117,91
21	6200	Kalimantan Tengah	106,95
22	6300	Kalimantan Selatan	103,55
23	6400	Kalimantan Timur	117,60
24	6500	Kalimantan Utara	127,99
25	7100	Sulawesi Utara	111,62
26	7200	Sulawesi Tengah	95,63
27	7300	Sulawesi Selatan	99,11
28	7400	Sulawesi Tenggara	107,98
29	7500	Gorontalo	101,69
30	7600	Sulawesi Barat	98,39
31	8100	Maluku	121,76
32	8200	Maluku Utara	127,99
33	9100	Papua Barat	146,46
34	9400	Papua	239,98

Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017  
(Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,41
2	1200	Sumatera Utara	101,49
3	1300	Sumatera Barat	95,33
4	1400	Riau	94,73
5	1500	Jambi	88,39
6	1600	Sumatera Selatan	98,64
7	1700	Bengkulu	93,27
8	1800	Lampung	90,09
9	1900	Bangka Belitung	101,71
10	2100	Kepulauan Riau	122,72
11	3100	DKI Jakarta	117,57
12	3200	Jawa Barat	96,78
13	3300	Jawa Tengah	93,05
14	3400	DI Yogyakarta	92,52
15	3500	Jawa Timur	97,50
16	3600	Banten	97,88
17	5100	Bali	111,64
18	5200	Nusa Tenggara Barat	91,63
19	5300	Nusa Tenggara Timur	95,94
20	6100	Kalimantan Barat	109,12
21	6200	Kalimantan Tengah	97,47
22	6300	Kalimantan Selatan	101,67
23	6400	Kalimantan Timur	109,21
24	6500	Kalimantan Utara	118,27
25	7100	Sulawesi Utara	112,05
26	7200	Sulawesi Tengah	88,13
27	7300	Sulawesi Selatan	95,57
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,75
29	7500	Gorontalo	92,76
30	7600	Sulawesi Barat	88,61
31	8100	Maluku	121,06
32	8200	Maluku Utara	120,92
33	9100	Papua Barat	140,04
34	9400	Papua	229,82



Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2013  
Provinsi Bali (Kota Samarinda = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	91,26
2	5102	Tabanan	105,46
3	5103	Badung	89,72
4	5104	Gianyar	72,91
5	5105	Klungkung	82,40
6	5106	Bangli	88,31
7	5107	Karangasem	87,66
8	5108	Buleleng	101,96
9	5171	Denpasar	99,60

Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2014  
Provinsi Bali (Kota Samarinda = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	88,37
2	5102	Tabanan	101,06
3	5103	Badung	91,82
4	5104	Gianyar	81,63
5	5105	Klungkung	83,30
6	5106	Bangli	87,26
7	5107	Karangasem	87,75
8	5108	Buleleng	98,86
9	5171	Denpasar	96,16

Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2015  
Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	107,02
2	5102	Tabanan	105,69
3	5103	Badung	106,08
4	5104	Gianyar	98,73
5	5105	Klungkung	99,65
6	5106	Bangli	102,84
7	5107	Karangasem	104,63
8	5108	Buleleng	106,99
9	5171	Denpasar	103,59

Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2016  
Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	113,47
2	5102	Tabanan	111,79
3	5103	Badung	111,09
4	5104	Gianyar	105,32
5	5105	Klungkung	106,30
6	5106	Bangli	110,07
7	5107	Karangasem	109,98
8	5108	Buleleng	113,74
9	5171	Denpasar	110,11

Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2017  
Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	112,93
2	5102	Tabanan	116,36
3	5103	Badung	114,54
4	5104	Gianyar	112,40
5	5105	Klungkung	101,40
6	5106	Bangli	111,63
7	5107	Karangasem	106,66
8	5108	Buleleng	118,47
9	5171	Denpasar	111,37



**DATA**  
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226  
Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162  
E-mail: [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)  
Homepage: <http://bali.bps.go.id>



917860211393543